

**KEDUDUKAN HUKUM DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH DALAM MEMASTIKAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH
PADA BANK UMUM SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh

Talby Maulana Hendrawan

NIM. 05020722074



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Talby Maulana Hendrawan
NIM : 05020722074
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Kedudukan Hukum dan Kewenangan Dewan Pengawas
Syariah Dalam memastikan kepatuhan Prinsip Syariah
pada Bank Umum Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 November 2025

Yang menyatakan,



Talby Maulana Hendrawan
NIM. 05020722074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Talby Maulana Hendrawan

NIM : 05020722074

Judul : Kedudukan Hukum dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan Kepatuhan Prinsip Syariah pada Bank Umum Syariah

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 26 November 2025

Pembimbing,



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Talby Maulana Hendrawan

NIM. : 05020722074

Judul : Kedudukan Hukum dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah pada bank umum syariah.

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji III



Ikhsan Fatmahan Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198906172015031006

Penguji II



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.

NIP. 197001182002121001

Penguji IV



Hurin Havati Alin, S.Hub.Int., M.H.

NIP. 199106012025052003

Surabaya, 10 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sunnah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Talby Maulana Hendrawan
NIM : 05020722074
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum
E-mail address : davidalby561@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

KEDUDUKAN HUKUM DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DALAM MEMASTIKAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK UMUM

SYARIAH

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Januari 2026

Penulis

(Talby Maulana Hendrawan)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah pada bank umum syariah di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah pada bank umum syariah, dan (2) bagaimana kewenangan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan.

Pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif Dewan Pengawas Syariah memiliki kedudukan hukum yang sah dan strategis sebagai organ internal bank syariah yang berfungsi melakukan pengawasan kepatuhan syariah. Kewenangan DPS meliputi pemberian nasihat dan saran kepada direksi serta pengawasan terhadap kegiatan dan produk bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, kewenangan DPS dalam praktik masih bersifat terbatas karena tidak disertai kekuatan mengikat dan sanksi hukum yang tegas, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan syariah.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya belum optimal dalam menjamin kepatuhan prinsip syariah pada bank umum syariah. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan regulasi yang memberikan kewenangan mengikat kepada DPS, peningkatan independensi DPS dalam struktur bank, serta pembatasan perangkapan jabatan guna mendukung efektivitas pengawasan syariah secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori	12
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KEDUDUKAN HUKUM DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK UMUM SYARIAH	21
A. Konsep Dasar Kedudukan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia	21
B. Unsur-unsur kedudukan hukum dalam suatu Lembaga	24
C. Pengertian Bank Umum Syariah	27
1. Karakteristik Perbankan Syariah	32
2. Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah	35
D. Posisi Dewan Pengawas Syariah sebagai Lembaga Internal Bank Umum Syariah	38
BAB III KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	44
A. Konsep Dasar Kewenangan dalam Hukum Administrasi dan Hukum Perbankan ...	44
1. Atribusi	45
2. Delegasi	46

3. Mandat	46
B. Dasar Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Syariah	48
C. Bentuk Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Syariah.....	51
D. Batas Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Struktur Bank Syariah	54
BAB IV ANALISIS NORMATIF YURIDIS ATAS KEDUDUKAN HUKUM DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	63
A. Analisis hubungan antara Kedudukan Hukum dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah.....	63
B. Analisis Yuridis Kecukupan Regulasi dalam Mengatur Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah.....	65
C. Analisis secara Keseluruhan tentang Kedudukan Hukum dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah.....	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	76

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-16 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Bagir Manan, *Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003) .

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

JURNAL-JURNAL

Absor, choirul, kharis fadlullah hana, and fatikha rizqya nur. “ada apa dengan dewan pengawas syariah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah?” *Malia: journal of islamic banking and finance* 3, no. 2 (december 2019): 15.

Afifah, fatma, and sri warjiyati. “tujuan, fungsi dan kedudukan hukum.” *Kertha semaya : journal ilmu hukum* 2, no. 2 (2024):

Afifah, fitri, muhammad iqbal fasa, and a khumaidi ja'far. “tinjauan perspektif hukum islam terhadap implementasi pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah di koperasi syariah pada kspps btm bimu way dadi sukarama bandar lampung.” *Jurnal akuntansi indonesia* 2, no. 8 (2021):

Afiska, lila, dian fitria handayani, and vanica serly. “pengaruh karakteristik dewan pengawas syariah (dps) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan (ojk) indonesia.” *Jurnal eksplorasi akuntansi* 3, no. 4 (november 2021): 784–98.

Anggadini, sri dewi. “mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah dan bank indonesia terhadap bank syariah.” *Majalah ilmiah unikom* 12, no. 1 (november 2015).

Arifin, desi siti habibah, dede kania, and syahrul anwar. Implications of dual positions of syariah supervisory board on the effectiveness of supervision in islamic financial institutions. 5, no. 2 (2024).

Azizah, jumainii, and erinos nr. “pengaruh dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan syariah.” *Jurnal eksplorasi akuntansi* 2, no. 1 (march 2020): 2554–69.

Cupian, cupian, fakhri afif mulyana, and sarah annisa noven. “pengaruh corporate governance terhadap green banking disclosure index di perbankan syariah periode 2016-2019 studi kasus: bank mandiri syariah, bank bni syariah, bank bca syariah, bank bri syariah, bank mega syariah dan bank muamalat.” *Jurnal ilmiah ekonomi islam* 9, no. 2 (july 2023): 23.

Devi, ni made lalita sri, and i made dedy priyanto. “kedudukan hukum perseroan terbatas yang belum berstatus badan hukum.” *Kertha semaya : journal ilmu hukum* 7, no. 5 (january 2019): 11.

- Fatch, mohammad. "konstruksi filosofis fatwa dsn-mui." *Jurnal hukum islam*, december 21, 2018, 155–71.
- Gandara, moh. "kewenangan atribusi, delegasi dan mandat." *Khazanah hukum* 2, no. 3 (november 28, 2020): 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.
- Hidayati, noor kholifah, ro'fah setyowati, and ninik zakiyah. "peran dewan pengawas syariah (dps) dan dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (dsn-mui) dalam pengembangan industri wisata halal indonesia." *Jurnal masharif al-syariah: jurnal ekonomi dan perbankan syariah* 6, no. 3 (december 2021): 688.
- Ilman, afnan nur, and saiful muchlis. "analisis peran dewan pengawas syariah dalam pemenuhan syariah compliance di bprs niaga madani kc makassar." *Jurnal riset keuangan dan akuntansi* 3, no. 5 (2025): 17.
- Ilyas, rahmat. "peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah." *Jps (jurnal perbankan syariah)* 2, no. 1 (april 2021): 42.
- Jannah, siti nur, and fauzatul laily nisa. "Peranan dewan pengawas syariah terhadap syariah compliance pada perbankan syariah di indonesia." 1, no. 5 (2024).
- M, abdullah ariyastya putra, sri wigati, delfikar akbar, and darel hylmi wicaksana. "relevansi dan tantangan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam era ekonomi digital." *Ma'mal: jurnal laboratorium syariah dan hukum* 5, no. 5 (october 2024): 498–517.
- Mediawati, elis, and indria fitri afiyana. "dewan pengawas syariah dan pengungkapan sukarela pada bank umum syariah di indonesia." *Jurnal riset akuntansi dan keuangan* 6, no. 2 (august 2018): 25.
- Misbach, irwan. "kedudukan dan fungsi dewan pengawas syariah dalam mengawasi transaksi lembaga keuangan syariah di indonesia." *Jurnal suara hukum* 9, no. 5 (2025): 17.
- Mujib, ines prasheila kusmastuti abdul. "opini dewan pengawas syariah terhadap persoalan-persoalan di bank syariah." <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih> volume 01, no. Bank syariah (4) desember2023).
- Munir, moch saiful. Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. N.d.

- Munthe, abdul karim, ichsan suryo pramadhandi, and rahmat indera satrya. Peran dewan pengawas syariah dalam pemenuhan syariah compliance oleh lembaga keuangan syariah. 2, no. 3 (2019).
- Murdiansyah, isnan. "leverage, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah dan pengaruhnya terhadap pengungkapan islamic social reporting (isr)." *Malia: journal of islamic banking and finance* 5, no. 1 (july 2021): 43.
- Nasir, melisa, elmi khoiriyah, bagus priyono pamungkas, inas hardianti, and raesitha zildjianda. "kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di indonesia." *Al-manhaj: jurnal hukum dan pranata sosial islam* 5, no. 1 (february 2023): 241.
- Nurhisam, luqman. "kepatuhan syariah (syariah compliance) dalam industri keuangan syariah." *Jurnal hukum ius quia iustum* 23, no. 1 (2016): 77–96.
- Nurwahyuni, nurwahyuni, siti sumartini, and saeful kholik. "kedudukan hukum dalam perspektif negara hukum modern." *Jurnal suara hukum* 4, no. 1 (january 2023): 224-242.
- Panjaitan, santi rohdearni and eva sriwiyanti. "analisis pengaruh lintas keanggotaan dewan pengawas dan keahlian anggota dewan pengawas terhadap pengungkapan laporan dewan pengawas pada bank syariah di indonesia 2017 – 2019: analysis of the influence of cross-over the supervision board membership and the expertise of supervisory board members on disclosure of the supervisory council's report disclosure in syariah banks in indonesia 2017-2019." *Jurnal ilmiah accusi* 2, no. 1 (may 2020): 28-38.
- Prabowo, bagya agung, and jasri bin jamal. "peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di indonesia." *Jurnal hukum ius quia iustum* 24, no. 1 (january 2017): 113–29.
- Program magister kenotarian universitas padjajaran, huriyah raih cita, lastuti abubakar, fakultas hukum universitas padjajaran, etty mulyati, and fakultas hukum universitas padjajaran. "kedudukan hukum kreditur baru penerima pengalihan piutang tanpa persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya." *Jurnal bina mulia hukum* 3, no. 1 (september 2018): 1–14.
- Rahmat ramadhani. "kedudukan hukum perjanjian perikatan jual beli (ppjb) dalam kegiatan pendaftaran peralihan hak atas tanah." *Iuris studia: jurnal kajian hukum* 6, no. 3 (may 2022): 13.

Rauf, abd. “.” *Al-manhaj: jurnal hukum dan pranata sosial islam* 12, no. 1 (2013): 15.

Septiatin, aziz. “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah periode 2016-2020.” *Jurnal manajemen dayasaing* 24, no. 1 (september 2022): 80–92.

Sulthana, nabila yumna, and fitri kurniawati. “optimalisasi strategi dewan pengawas syariah (dps) dalam meningkatkan tata kelola perbankan syariah di indonesia.” *Jurnal ilmiah research and development student* 4, no. 2 (2025): 13.

Susanto, muhamad iqbal. “kedudukan hukum people power dan relevansinya dengan hak kebebasan berpendapat di indonesia.” *Volksgeist: jurnal ilmu hukum dan konstitusi* 2, no. 2 (december 2019): 225–37.

Syahbandir, mahdi. “kedudukan hukum adat dalam sistem hukum.” *Al-manhaj: jurnal hukum dan pranata sosial islam* 2, no. 50 (2010): hlm 9.

Syahrial, murah. “peran dewan pengawas syariah (dps) terhadap kepatuhan pemenuhan syariah pada perbankan syariah.” *Jurnal an-nahl* 9, no. 1 (june 2022): 45–52.

Taufiq, m. “optimalisasi peran dewan pengawas syariah di lembaga keuangan mikro syariah.” *Al-huquq: journal of indonesian islamic economic law* 2, no. 1 (july 24, 2020): 74. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3350>.

Thomas, benedictus julian. “kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional.” *Iuris studia: jurnal kajian hukum* 7, no. 2 (2023): 13.

Zamroni, mohammad. *Konsep kewenangan dalam perspektif hukum perdata*. 36, no. 2 (2024)